

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Baswir; 2000).. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka pelaksanaan pembangunan lebih ditingkatkan dan diperluas terutama pembangunan ekonomi untuk lebih mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian nasional, seperti tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Nama koperasi memang tidak disebutkan dalam pasal 33, tetapi “asas kekeluargaan” itu ialah koperasi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi dan selaras dengan semangat dan jiwa gotong royong Bangsa Indonesia.

Koperasi memiliki beberapa prinsip yang diantaranya adalah keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi tersebut menjadi keunggulan koperasi dibandingkan badan usaha lainnya apabila diterapkan dengan benar.

Saat ini koperasi di Indonesia terus berkembang, terbukti dari jumlah koperasi yang meningkat setiap tahunnya. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa sampai Desember 2014 total koperasi di Indonesia mencapai 200.488 unit, dengan 147.249 (70,28%) unit koperasi aktif dan 62.239 (29,72%) unit lainnya tidak aktif. Dari jumlah koperasi yang 144.839 unit yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan atau melapor sebanyak 80.008 (54,33%) atau 38,19% dari jumlah koperasi keseluruhan. (Sumber: <http://inspeksiananews.com>; 2015)

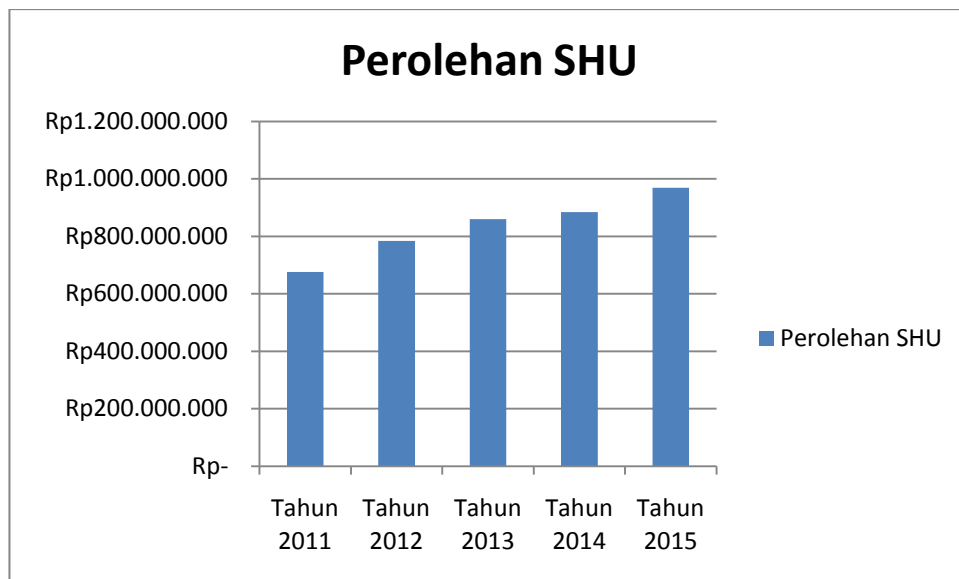
Perkembangan koperasi diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi semakin maju, mandiri dan semakin mengakar di masyarakat. Hardiningsih (2011) dalam Erindani (2013) berpendapat untuk menjadikan koperasi semakin maju tidak lepas dengan peran anggota beserta pengurus koperasi tersebut. Dengan adanya partisipasi aktif dari setiap anggota dan juga kualitas dari pengurus koperasi tersebut, maka peran koperasi akan terwujud. Selain dari pihak anggota maupun pengurusnya, peningkatan kualitas pada koperasi ini juga tak lepas dari pemberdayaan aspek keuangan pada koperasi tersebut. Suatu koperasi dituntut harus mampu tetap bertahan guna membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan mengoptimalkan keuntungan dan mensinergikan seluruh sumber daya alam yang dimiliki. Berhasil atau tidaknya

suatu koperasi dapat dilihat bagaimana para pengurus bekerja secara efektif dan efisien pada kinerja koperasi termasuk kinerja keuangan.

Laporan keuangan koperasi pada masa lalu dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan koperasi. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang diperlukan pimpinan koperasi untuk mengetahui tentang kekayaan dan kewajiban dari hasil aktivitas koperasi. Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyediakan indikator penting yang berhubungan dengan keadaan keuangan koperasi, sehingga dapat dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan sekaligus menggambarkan kinerja koperasi. (Erindani; 2013)

Salah satu jenis koperasi menurut golongan fungsionalnya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang sekarang disebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). KPRI merupakan salah satu jenis koperasi primer dimana para anggotanya merupakan para pegawai negeri yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya penghasilan tetap para anggotanya, maka koperasi tersebut dapat memobilisasi dana dengan menggerakkan simpanan anggota secara teratur. Dari penjelasan tersebut, maka koperasi jenis KPRI menarik untuk diteliti. Subyek yang diteliti adalah KPRI Warsela.

KPRI Warsela memiliki 2 unit usaha, yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Pertokoan. Berikut grafik perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada KPRI Warsela dari tahun 2011-2015.



Sumber: Laporan Keuangan KPRI Warsela tahun 2011-2015, yang diolah

Gambar 1.1
Perolehan SHU KPRI Warsela

Berdasarkan grafik tersebut, maka pada tahun 2011-2015 SHU dapat dikatakan terjadi kenaikan. Kenaikan SHU tersebut tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja keuangannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Walaupun SHU mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi SHU yang dihasilkan tidak sesuai dengan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) koperasi yang telah disetujui dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebelumnya.

Pembagian SHU pada Unit Pertokoan relatif kecil dibandingkan dengan Unit Simpan Pinjam (USP). Dimana Unit Simpan Pinjam mendapatkan keuntungan Rp 53 sedangkan pada Unit Pertokoan hanya mendapat Rp 30. Hal ini dikarenakan para anggota lebih butuh dana daripada pembelian. Di bidang permodalan, struktur permodalan USP maupun Unit Pertokoan masih bergantung pada modal pinjaman sebesar Rp 14.551.902.217,- sedangkan modal sendirinya sebesar Rp 7.831.878.800,-.

Pada laporan arus kas, terdapat masalah mengenai penurunan SHU tahun berjalan dan penggunaan kas pada Unit Pertokoan. Dimana SHU tahun berjalan Unit Pertokoan mengalami penurunan sebesar Rp 100.984.221,- dan dalam hal penggunaan kas sebesar Rp 914.080.666,-. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi kurang modal dalam membayar hutang atau kewajiban-kewajibannya.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui, terutama bagi pihak manajer. Hal ini dikarenakan penilaian tersebut memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai koperasi di masa lalu dan waktu yang sedang berjalan, sehingga dapat diketahui kelebihan maupun kekurangan unit tersebut.

Dalam rangka mengetahui dan menilai kinerja KPRI Warsela dalam proses mencapai tujuan, diperlukan adanya pengukuran terhadap kinerja. *Core business* yang lebih rendah daripada Unit Simpan Pinjam dapat mengganggu kedudukan SHU koperasi tersebut. Oleh karena itu, koperasi tersebut perlu dikaji kinerja keuangannya. Menurut Darmawati (2007;501) dalam Erindani (2013), “Koperasi dianggap sehat apabila mampu mengelola keuangan atau sumber daya

yang ada. Pengelolaan keuangan yang baik akan mampu meningkatkan pendapatan anggotanya.” Laporan keuangan dapat memberi informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh koperasi tersebut, dari periode tertentu. Untuk memperoleh informasi tersebut, laporan keuangan haruslah dianalisis. Melalui analisis keuangan diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan usaha KPRI Warsela dari tahun ke tahun dan efektivitas pengelolaan koperasi. Mengetahui tingkat perubahan keuangan baik modal, laba, maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan, sehingga dapat mengerahui kondisi atau prospek koperasi di masa mendatang. Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola usaha koperasi.

Salah satu teknik analisis laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio yang dipakai dalam penelitian ini meliputi analisis rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas. Rasio likuiditas menggambarkan tingkat kemampuan koperasi untuk dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Koperasi tersebut dikatakan likuid apabila mempunyai aktiva lancar yang cukup besar untuk membayar hutang-hutangnya yang harus dipenuhi, dan sebaliknya dikatakan tidak likuid apabila tidak mempunyai aktiva lancar yang cukup besar untuk membayar semua kewajiban yang segera akan jatuh tempo. Rasio solvabilitas menggambarkan tingkat kemampuan koperasi untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan

rasio profitabilitas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan/laba.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang kinerja keuangan antara lain telah dilakukan oleh Erindani (2013), Susrusa dan Darmawan (2013), dan Lia, dkk. (2015). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Erindani menyatakan bahwa rasio likuiditas, rasio solvabilitas maupun rasio rentabilitas/profitabilitas menunjukkan keadaan yang sehat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Susrusa dan Darmawan diketahui bahwa kinerja keuangan koperasi serba usaha di Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan sangat efisien bila dilihat dari dua variabel rasio keuangan seperti (*current ratio* dan *debt to equity ratio*), dua variabel menunjukkan cukup efisien yaitu (*cash turnover* dan rentabilitas ekonomi) sedangkan dua variabel lagi masuk katagori kurang efisien (*debt to asset ratio* dan *receivable turnover*). Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pengaruh variabel rasio keuangan secara parsial terhadap rentabilitas ekonomi hanya variabel *debt to asset ratio* yang berpengaruh secara signifikan, sedangkan ke empat variabel yang lain *current ratio*, *debt to equity ratio*, *receivable turnover* dan *cash turnover* menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lia, dkk. diketahui bahwa tingkat likuiditas perusahaan sangat besar (*over liquidity*). Tingkat *leverage* sangat kecil sehingga resiko perusahaan juga sangat rendah. Tingkat aktivitas dan tingkat profitabilitas perusahaan dalam kondisi kurang baik karena mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Secara umum, penelitian tersebut menganalisis kinerja keuangan suatu koperasi dengan berbagai metode analisis yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek yang diambil (koperasi) yaitu meneliti tentang koperasi dan menganalisis kinerja keuangan koperasi. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti (KPRI “Warsela”), periode pengamatan yang digunakan, dan metode analisis yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas penilaian terhadap perkembangan kinerja keuangan dianggap penting untuk melihat apakah perusahaan tersebut mengalami peningkatan atau penurunan, maka perlu diadakan suatu analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui perkembangan keuangan pada KPRI “Warsela”.

Dengan meningkatnya SHU tersebut tidak didukung oleh kesesuaian RAPB, serta pendapatan *core business* yang lebih rendah dari pendapatan lain, dan terjadi penurunan SHU berjalan, maka peneliti tertarik untuk meneliti kinerja keuangan koperasi akan dilakukan di Kabupaten Gresik dengan judul penelitian: ”Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Warsela Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan KPRI Warsela dilihat dari aspek rasio Likuiditas?
2. Bagaimana kinerja keuangan KPRI Warsela dilihat dari aspek rasio Solvabilitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan KPRI Warsela dilihat dari aspek rasio Profitabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan KPRI Warsela dilihat dari aspek rasio Likuiditas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan KPRI Warsela dilihat dari aspek rasio Solvabilitas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan KPRI Warsela dilihat dari aspek rasio Profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi KPRI Warsela

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengelola keuangan KPRI Warsela dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan agar lebih baik di masa yang akan datang.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan, informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk referensi dalam penelitian berikutnya yang berkenaan dengan analisis kinerja keuangan koperasi.